

Abstrak

Terdapat peraturan pemerintah yang memberikan aturan hukum untuk menjaga marwah jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 (PP PPAT). PP PPAT menyatakan bahwa PPAT dalam mengemban kewajiban dan kewenangannya Pasal 10 ayat 4 huruf g sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT dilarang melakukan perbuatan tercela, jika melakukan perbuatan tercela di dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dijelaskan PPAT dapat diberhentikan secara sementara, yaitu sanksi secara administratif berupa pemberhentian sementara. Makna perbuatan tercela tidak diatur dan dijelaskan secara seksama dalam PP PPAT tersebut. Produk hukum harus melahirkan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum.

Permasalahan Hukum yang muncul yaitu Rasio legis pengaturan perbuatan tercela sebagai salah satu pemberhentian sementara PPAT, dan pengaturan PP PPAT perbuatan tercela yang menjamin kepastian hukum.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis rasio legis pencantuman unsur norma mengenai perbuatan tercela dalam PP PPAT.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik analisis data kualitatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tercela diartikan secara umum, tidak ada parameternya sehingga dalam praktek terdapat berbagai kasus yang ditemukan akan tetapi dalam kategori pelanggaran perbuatan tercela harus dibuktikan terlebih dahulu dengan Putusan Pengadilan. Prosedur penyelesaian masalah yaitu melalui aduan yang diterima oleh MPPD, dilakukan pemanggilan terhadap PPAT yang bersangkutan, lalu memberikan sanksi berupa teguran tertulis. Sanksi diatur dalam Kode Etik Profesi PPAT dengan sanksi berurutan.

Kesimpulan dari penelitian ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 10 ayat 4 huruf g dapat dikaji kembali dan dapat dilakukan penyederhanaan peraturan sehingga peraturan tersebut memberikan kejelasan konsep dan muatan di dalam isi pasal yang mengatur jabatan PPAT.

Kata Kunci: *PPAT, Perbuatan Tercela, Kepastian Hukum*

Abstract

There is a government regulation that provides legal rules to maintain the dignity of the Land Deed Official position, namely Government Regulation Number 24 of 2016 (PPAT). PPAT states that PPAT in carrying out its obligations and authority Article 10 paragraph 4 letter g as a Land Deed Official, PPAT is prohibited from committing misconduct, if it commits misconduct in Government Regulation Number 24 of 2016 it is explained that PPAT can be temporarily dismissed, namely administrative sanctions in the form of temporary dismissal. The meaning of misconduct is not regulated and explained thoroughly in the PPAT. Legal products must give birth to one of the objectives of law, namely legal certainty.

Legal issues that arise are the ratio legis of the regulation of misconduct as one of the temporary dismissal of PPAT, and the regulation of PPAT misconduct that guarantees legal certainty.

The purpose of this study is to analyze the ratio legis of the inclusion of norm elements regarding misconduct in PPAT.

This research uses empirical juridical research methods with qualitative data analysis techniques and the research specifications used are descriptive analytical.

The results of the study show that misconduct is defined in general, there are no parameters so that in practice there are various cases found but in the category of misconduct violations must first be proven by a Court Decision. The problem solving procedure is through a complaint received by MPPD, summoning the PPAT concerned, then giving sanctions in the form of a written warning. Sanctions are regulated in the PPAT Professional Code of Ethics with sequential sanctions.

The conclusion of this research is that Government Regulation Number 24 of 2016 Article 10 paragraph 4 letter g can be reviewed and regulations can be simplified so that the regulation provides clarity of concept and content in the contents of the article governing the position of PPAT.

Keywords: PPAT, Misconduct, Legal Certainty